



Pengaruh Tingkat Pendapatan Asli Daerah Terhadap Fiscal Stress Melalui Kemandirian Keuangan Daerah Sebagai Variabel Mediasi

Nurhasanah^{1*}, R. Neneng Rina Andriani², Irman Firmansyah³

¹²³ Universitas Siliwangi

¹Email: *nh7804493@gmail.com

Article History

Received: 29-05-2024

Accepted: 30-06-2024

Copyright@year

owned by Author(s).

Published by JIAM.

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze fiscal stress in provinces in Indonesia in 2016-2022. As well as the effect of the level of local revenue on fiscal stress through regional financial independence as a mediating variable. This study uses secondary data, namely thue APBD and LRA obtained from the official website of the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK). The data analysis technique used in this research is path analysis. The result of data analysis show that: The level of Regional Original Revenue in all samples studied is categorized as unsuccessful, Regional Financial Independence on average is categorized as moderate, which means that it is in the participatory relationship pattern, while Fiscal Stress in all samples studied is still categorized as high. In addition, the level of Local Revenue has a positive and significant effect on Fiscal Stress. However, Regional Financial Independence is not able to mediate the effect of Regional Original Revenue Level on Fiscal Stress

Key words: Regional Original Revenue Level; Regional Financial Independence; Fiscal Stress.

PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya melalui pembangunan serta pelayanan publiknya. Hal ini dikarenakan telah terjadi desentralisasi (Irwansyah et al., 2023; Ramadhani & Rinaldi, 2023a, 2023b; Rinaldi et al., 2023, 2024; Rinaldi & Ramadhani, 2023, 2024b, 2024a). Berarti pemerintah daerah telah diberikan tanggung jawab yang mengharuskan untuk lebih berperan aktif dalam mengurus sendiri urusan pemerintah daerahnya. Namun, di sisi lain bagi beberapa daerah, otonomi bisa jadi menimbulkan persoalan tersendiri mengingat adanya tuntutan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Sehingga nantinya akan memicu suatu daerah mengalami tekanan fiskal (fiscal stress).

Sejalan dengan pendapat menurut Rawung et al., (2018:258) yang mengungkapkan bahwa Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah akan menentukan keberhasilan kinerja pembangunan di daerah pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berupaya untuk menghindari terjadinya fiscal stress dengan cara mengoptimalkan PADnya melalui pajak. Upaya pajak ini jadi solusi untuk menggali PAD agar daerah dapat terhindar dari tekanan fiskal atau fiscal stress.

Terjadinya fiscal stress dibeberapa daerah dikarenakan salah satu faktornya yaitu adanya tuntutan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin tinggi.

Oleh karena itu, daerah diharapkan mampu menggali potensi sumber-sumber PAD secara maksimal (Susilawati et al., 2018:97).

Berdasarkan data yang ada di djpk.kemenkeu.go.id menunjukkan bahwa kebanyakan realisasi PAD di beberapa daerah provinsi mengalami peningkatan. Hal tersebut terjadi dikarenakan daerah mengalami fiscal stress karena daerah berusaha untuk menaikkan PADnya sendiri agar lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan. Seperti yang diungkapkan Hariani & Widyawati (2020:18) yang menyatakan bahwa pada saat fiscal stress tinggi, pemerintah cenderung menggali potensi penerimaan pajaknya guna meningkatkan penerimaan daerahnya. Maka dari itu, tingginya angka upaya pajak dapat diidentikkan dengan kondisi fiscal stress. Semakin tinggi upaya pajak daerah maka menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami fiscal stress yang tinggi. Hal tersebut terjadi karena pemerintah daerah semakin berupaya untuk meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah untuk menutup belanja daerah yang cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun.

Akan tetapi, pemanfaatan PAD tersebut belum dikatakan optimal dalam memenuhi keberhasilan pembangunan daerahnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya beberapa pembangunan daerah yang mengalami mangkrak (tidak optimal).

Seperti yang dikutip dari Rukita.co (2022) yang menyatakan bahwa ada beberapa proyek mangkrak yang ada di Indonesia. Diantaranya Bandara Kertajati yang sudah beroperasi tetapi sepi peminat. Bandara Kertajati tersebut dibangun dengan 70% dari APBD Jawa Barat (Tirto.id, 2018).

Ada lagi yang terjadi pada beberapa proyek mangkrak seperti di Provinsi Sumatera Barat senilai ratusan miliar rupiah. Proyek tersebut bersumber dari APBD Provinsi. Proyek ini terdiri dari paket pembangunan gedung kebudayaan, stadium utama, dan jembatan Batu Bala. (jurnalsumbar.com, 2022). Serta masih banyak lagi proyek mangkrak dari beberapa daerah. Hal tersebut mengakibatkan kerugian pada APBD Provinsi untuk pengeluaran belanja daerah. Yang berarti menunjukkan bahwa semakin tinggi belanja daerah yang dibutuhkan maka dana yang dibutuhkan akan semakin tinggi juga agar nantinya daerah terhindar dari fiscal stress.

Selain itu menurut Septira et al., (2019:58) hal ini dapat difahami karena fiscal stress pada era otonomi daerah dinilai lebih kuat. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya tuntutan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah untuk membiayai pengeluaran daerah yang disebabkan oleh sumber penerimaan baik di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat.

Jika PAD mengalami keterbatasan atau kesulitan dalam menutup pengeluaran daerahnya. Maka hal tersebut mengartikan bahwa adanya perilaku asimetris pemerintah daerah yang cenderung lebih mengandalkan dana perimbangan dari pemerintah pusat dibandingkan dengan melakukan upaya untuk meningkatkan PAD.

Besarnya PAD yang dihasilkan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerahnya akan mempengaruhi tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan pinjaman daerah itu akan mengukur kemandirian keuangan suatu daerah. Semakin mandiri suatu daerah maka semakin rendah ketergantungannya terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan pinjaman daerah.

Ketergantungan pemerintah daerah terhadap suntikan dana atau bantuan dana dari pemerintah pusat masih tinggi. Sebanyak 68 persen dari total pendapatan daerah masih bersumber dari dana TKD. Maka diperlukan opsi pembiayaan alternatif yang kreatif untuk membuka akses pembiayaan serta mendorong kemandirian fiskal daerah (Kompas.id, 2023). Hal ini mengidentifikasi bahwa kemandirian keuangan daerah belum optimal karena masih bergantung pada dana transfer.

Jika ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat terus berlangsung, maka akan berpengaruh terhadap meningkatnya beban APBN dalam pembangunan. Oleh karena itu, sistem desentralisasi untuk kemandirian keuangan daerah dengan mengoptimalkan PADnya harus diwujudkan, hal tersebut perlu dilakukan agar pemerintah daerah terhindar dari fiscal stress.

Selain itu, hal ini juga didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Septira et al., (2019:62), Syifa et al., (2021:83), dan Putra et al., (2023:737) yang menyatakan bahwa pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap fiscal stress. Namun

berbanding terbalik dengan Manafe et al., (2018:132) dan Ulfa et al., (2021:195) yang menyatakan bahwa fiscal stress tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan PAD.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Tolosang (2018:91), Rivaldi & Anggraini (2022:6837), serta Andriani & Wahid (2018:35) menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun berbanding terbalik dengan Kusmila (2023:9232) yang menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah. Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Presetyo & Rahayu (2019:880) menyatakan bahwa fiscal stress tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Jadi dapat disimpulkan, pada hasil penelitian-penelitian terdahulu di atas hanya menjelaskan pengaruh pertumbuhan PAD terhadap fiscal stress dan pengaruh PAD terhadap kemandirian keuangan daerah saja. Tidak menjelaskan hubungan 3 variabel seperti pada penelitian ini yaitu tingkat Pendapatan Asli Daerah, fiscal stress, dan kemandirian keuangan daerah. Selain itu, pada penelitian ini kemandirian keuangan daerah dijadikan variabel mediasi yang berarti dapat dipengaruhi oleh tingkat Pendapatan Asli Daerah dan dapat mempengaruhi fiscal stress.

Pada populasi penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu di atas juga berbeda di mana di penelitian terdahulu hanya mencakup satu provinsi bahkan satu kota saja, akan tetapi dalam penelitian ini mencakup seluruh provinsi di Indonesia. Alasan dipilihnya populasi penelitian tersebut dikarenakan kejadian fiscal stress terjadi di sebagian besar wilayah di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian yang bertujuan untuk membuktikan asumsi bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak serta merta dapat menghindari terjadinya fiscal stress melalui kemandirian keuangan daerah perlu dilakukan. Hal ini didasarkan pada fenomena perilaku asimetris pemerintah daerah yang mengindikasikan bahwa *fiscal stress* tidak lagi dilatarbelakangi upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan PADnya.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Adapun teknik pengumpulan penelitian ini adalah data sekunder (Gede et al., 2024; Ghozali et al., 2024; Winanto et al., 2024). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan yang bersumber dari APBD pada provinsi-provinsi di Indonesia bagian anggaran dan realisasi yang diperoleh dari situs web resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) (www.djpk.kemenkeu.go.id).

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sensus atau *sampling total*. Hal ini dilakukan karena populasi memiliki data yang lengkap untuk bahan penelitian. Maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2016-2022 sebanyak 34 provinsi di Indonesia.

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.

1. Tingkat Pendapatan Asli Daerah

Tingkat Pendapatan Asli Daerah adalah analisis pertumbuhan yang dilakukan untuk mengetahui kecenderungan baik berupa kenaikan ataupun penurunan PAD dalam kurun waktu tertentu (Mahmudi, 2019:91). Rumus Pertumbuhan PAD menurut Santoso (2020):

$$\frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100\%$$

2. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan keuangan daerah (Halim, 2014:232). Rumus Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menurut Mahmudi (2019:140):

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

3. Fiscal Stress

Fiscal Stress adalah tekanan yang terjadi akibat keterbatasan penerimaan pendapatan pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kemandirian di daerahnya (Sibuea, 2017:4). Rumus Upaya Pajak menurut Karo et al., (2019:319):

$$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

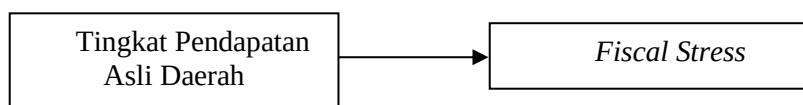
TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur digunakan dengan menggunakan korelasi, regresi dan jalur sehingga dapat diketahui untuk sampai pada variabel mediasi. Struktur model dalam penelitian ini yaitu menganalisis hubungan langsung variabel Tingkat Pendapatan Asli Daerah terhadap *Fiscal Stress* maupun hubungan tidak langsung variabel Tingkat Pendapatan Asli Daerah terhadap *Fiscal Stress* dengan variabel Kemandirian Keuangan Daerah sebagai variabel mediasi.

Pada penelitian ini juga menggunakan uji sobel (sobel test) dengan cara menentukan koefisien regresi (a dan b) dan standar errornya (Sa dan Sb) dengan menggunakan SPSS dari model yang digunnnakan. Setelah itu, nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam uji sobel online sehingga diketahui hasil *t* hitungunya. Oleh karena itu, hasilnya dapat digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung antara variabel Tingkat Pendapatan Asli Daera terhadap *Fiscal Stress* melalui Kemandirian Keungan Daerah.

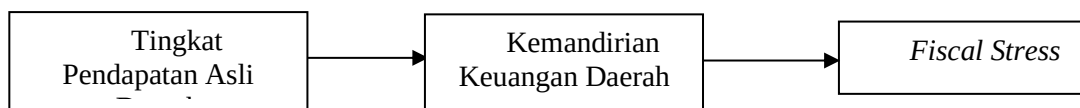
Maka model penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Substruktur I (Pengaruh Langsung Tingkat Pendapatan Asli Daerah terhadap *Fiscal Stress*)



Gambar 1 Substruktur I: Pengaruh Langsung Tingkat Pendapatan Asli Daera terhadap *Fiscal Stress*

2. Substruktur II (Pengaruh Tidak Langsung Tingkat Pendapatan Asli Daerah terhadap *Fiscal Stress* melalui Kemandirian Keuangan Daerah).



Gambar 2 Substruktur II: Pengaruh Tidak Langsung Pendapatan Asli Daera terhadap *Fiscal Stress* melalui Kemandirian Keuangan Daerah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tingkat PAD	238	-31.52	93.04	8.6080	13.36349
Kemandirian	238	7.00	276.69	74.8276	51.56768
Fiscal Stress	238	57.67	216.15	102.0830	17.72665
Valid N (listwise)	238				

Sumber: *Output SPSS 23*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat PAD tertinggi ada di Provinsi Papua pada tahun 2019, sedangkan terendah Provinsi Papua juga pada tahun 2020. Sementara

untuk kemandirian tertinggi ada pada DKI Jakarta pada tahun 2019 dan terendah Provinsi Papua Barat pada tahun 2019 juga. Kemudian untuk fiscal stress tertinggi ada di Provinsi Papua pada tahun 2019 serta terendah Provinsi Maluku pada tahun 2018.

Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pada kurun waktu tahun 2016-2022 pemerintah provinsi pada tingkat PAD berada pada kriteria tidak berhasil karena hasilnya kurang dari 30%. Kemudian pada kemandirian keuangan daerahnya sudah dalam pola hubungan partisipatif yang berarti pemerintah provinsi mendekati mampu untuk mandiri. Namun, pemerintah provinsi juga mengalami *fiscal stress* dikarenakan nilai upaya pajaknya tinggi.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardize d Residual
Normal Parameters ^{a,b} Most Extreme Differences Test Statistic	N	Mean	.238
		Std. Deviation	.0000000
		Absolute	14.08810336
		Positive	.077
		Negative	.077
			.077
			Unstandardize d Residual
Monte Carlo Sig. (2-tailed)		Sig.	.108d
99% Confidence Interval		Lower Bound	.100
		Upper Bound	.116

Sumber: *Output SPSS 23*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikan atas Monte Carlo (2-tailed) menunjukkan nilai sebesar 0,108. Di mana nilai $0,108 > 0,05$. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas *Kolmogorov Smimov* sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Autokorelasi

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Mo del	R	R Square	Adjust ed R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin- Watson
1	.6 23 ^a	.388	.383	13.51188	2.006

Sumber: *Output SPSS 23*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson dan juga ditambahkan metode *Cochrane Orcutt* sebesar 2,006. Sementara nilai nilai dU sebesar 1,805. Hal ini menunjukkan bahwa $dU < dw < 4-dU$ ($1,805 < 2,006 < 2,195$). Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini terbebas dari masalah autokorelasi.

3. Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Pengaruh Langsung

Tabel 4. Hasil Uji Pengaruh Langsung Tingkat Pendapatan Asli Daerah terhadap *Fiscal Stress*
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	95.164	1.090		87.286	.000
Tingkat PAD	.804	.069	.606	11.702	.000

Sumber: *Output SPSS 23*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi Tingkat Pendapatan Asli Daerah terhadap *Fiscal Stress* sebesar 0,606 sedangkan *t* hitung 11,702 dan nilai signifikansi sebesar 0,000.

Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai *t* hitung pada tabel coefficients sebesar 11,702 adapun *t* tabel dengan nilai *df* (*n-k*) yaitu $238-3 = 235$ adalah $\pm 1,651$. Maka *t* hitung $> t_{1/2 \alpha}$ yaitu $11,702 > 1,651$ atau nilai signifikansi yang diperoleh sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian tolak H_0 dan terima H_a yang mengandung makna bahwa

Selain itu dilihat juga dari nilai koefisien regresi Tingkat Pendapatan Asli Daerah yang positif menunjukkan bahwa Tingkat Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap *Fiscal Stress*.

Pengaruh Tidak Langsung

Tabel 5. Hasil Uji Pengaruh Tidak Langsung Tingkat Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	75.764	3.985		19.010	.000
Tingkat PAD	-.109	.251	-.028	-.433	.665

Sumber: *Output SPSS 23*

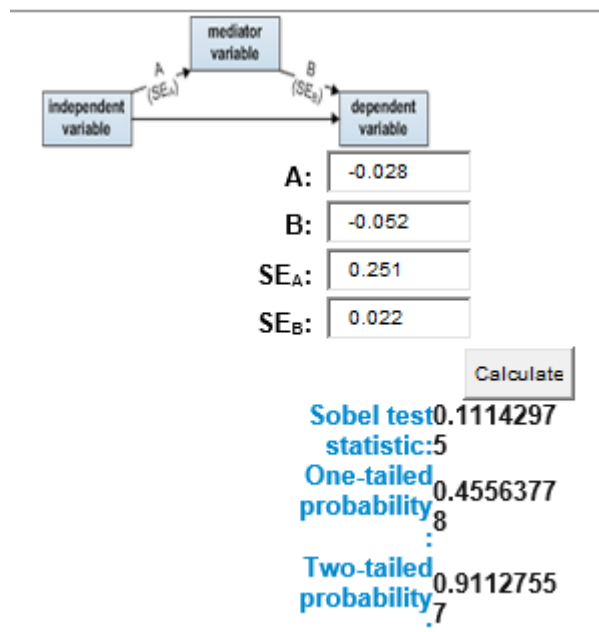
Tabel 6. Hasil Uji Pengaruh Tidak Langsung Kemandirian Keuangan Daerah terhadap *Fiscal Stress*
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	103.408	2.029		50.955	.000
Kemandirian	-.018	.022	-.052	-.792	.429

Sumber: *Output SPSS 23*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *a* atau koefisien jalur variabel independen yaitu pengaruh Tingkat Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah adalah sebesar -0,028 dengan standar eror 0,251. Adapun nilai *b* atau koefisien jalur mediasi yaitu pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap *Fiscal Stress* sebesar -0,052 dengan standar eror sebesar 0,022.

Adapun jika dihitung menggunakan uji sobel online hasilnya adalah sebagai berikut.



Sumber: *Daniel Soper.com*
Gambar 3. Hasil Uji Sobel

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t hitungnya adalah 0,103 untuk penggunaan rumus sedangkan untuk uji sobel online yang ada pada Gambar 3 t hitungnya 0,111. Sementara untuk t tabel dengan nilai df ($n-k$) $238-3 = 235$ adalah 1,651. Maka $-t_{1/2 \alpha} \leq t \text{ hitung} \leq t_{1/2 \alpha}$ yaitu $-1,651 \leq 0,103$ dan $0,111 \leq 1,651$. Maka terima H_0 dan tolak H_a yang mengandung makna bahwa tidak terdapat pengaruh mediasi atau Kemandirian Keuangan Daerah tidak mampu memediasi Tingkat Pendapatan Asli Daerah terhadap Fiscal Stress. Hal ini disebabkan karena Tingkat Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah yang tercermin melalui nilai probabilitas sebesar $0,641 > 0,05$ yang berarti tidak berpengaruh signifikan. Selain itu nilai signifikansi Kemandirian Keuangan Daerah terhadap *Fiscal Stress* yang tercermin melalui nilai probabilitas sebesar $0,426 > 0,05$ yang berarti tidak berpengaruh signifikan.

Pembahasan

PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP FISCAL STRESS

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Fiscal Stress. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa jika Tingkat Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan itu berarti Fiscal Stress juga meningkat karena semakin tinggi PAD ditingkatkan itu berarti upaya pajaknya juga tinggi yang menandakan adanya fiscal stress.

Hal ini dikarenakan realisasi PAD yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut sedang berusaha meningkatkan PADnya agar lebih besar dari anggaran PAD yang sebelumnya ditetapkan dari APBN. Hal tersebut terjadi karena daerah harus menutupi kebutuhan daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dengan PADnya sendiri yang tercermin melalui gencarnya upaya pajak yang dilakukan pemerintah daerah. Pada akhirnya kebutuhan daerah yang semakin tinggi tetapi tanpa adanya dukungan Pendapatan Asli Daerah akan menjadi sumber risiko bagi daerah (Ika et al., 2021:258). Oleh karena itu, pada kondisi ini pemerintah daerah mengalami fiscal stress yang tinggi. Maka hal ini sejalan dengan pendapat Hariani & Widyawati (2020:18) yang menyatakan bahwa pada saat fiscal stress tinggi, pemerintah cenderung menggali potensi penerimaan pajaknya guna meningkatkan penerimaan daerahnya.

Sementara itu peningkatan PAD tidak bisa terus mengandalkan pajak daerah dan retribusi daerah saja. Hal tersebut dikarenakan pergerakan ruangnya dibatasi oleh Undang-

Undang. Maka pemerintah daerah dapat menggali potensi daerah yang lain yang dapat membantu dan mendukung untuk meningkatkan PAD. Hal tersebut bisa dengan melakukan optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) atau aset daerah. Aset daerah perlu diamankan, tanah perlu disertifikatkan atas nama pemerintah daerah, serta pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan tanah yang mangkrak agar bisa menghasilkan dan meningkatkan PAD (bpkad.asahankab.go.id, 2022).

Pengelolaan aset daerah harus efektif dan efisien agar meningkat sehingga memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah. Aset daerah merupakan sumber daya yang penting bagi pemerintah daerah, dengan mengelola aset daerah secara benar dan memadai maka pemerintah akan mendapatkan sumber dana untuk membiayai pembangunan di daerah. Apabila optimalisasi aset terus berlanjut dan dapat menambah PAD maka pemerintah daerah tidak akan terus bergantung pada dana transfer dikarenakan ada sumber lain yang dapat meningkatkan PAD.

Di sisi lain sumber yang berasal dari PAD dapat dijadikan cerminan sejauh mana risiko yang berasal dari PAD menjadi pemacu terjadinya *fiscal stress*. Rendahnya PAD bisa jadi ancaman terjadinya *fiscal stress* apabila tidak ada sumber-sumber lain yang dapat diandalkan (Ika et al., 2021:277). Sama halnya seperti yang diungkapkan oleh Septira et al., (2019:62) menjelaskan bahwa pertumbuhan PAD dapat mempengaruhi *fiscal stress* (tekanan keuangan) yang dialami pemerintah daerah. Hal ini memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan lagi dalam pengelolaan PAD agar *fiscal stress* tidak terjadi. Maka dapat dikatakan jika tinggi rendahnya PAD yang diperoleh pemerintah daerah dapat mempengaruhi terjadinya *fiscal stress*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Septira et al., (2019:62), Al-Hadar et al., (2020:24), Fitryani et al., (2020), Putra et al., (2023:737), dan Rupilu et al., (2023:59) yang menyatakan bahwa pertumbuhan PAD berpengaruh terhadap *fiscal stress*

PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP *FISCAL STRESS* MELALUI KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAI VARIABEL MEDIASI

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah tidak mampu memediasi Tingkat Pendapatan Asli Daerah terhadap *Fiscal Stress*. Hal ini disebabkan karena Tingkat Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Fenomena yang terjadi seperti pemerintah daerah cenderung mengandalkan bantuan dana transfer pemerintah pusat dibandingkan melakukan upaya untuk meningkatkan PADnya. Padahal potensi Pendapatan Asli Daerah pada umumnya belum tergali secara maksimal. Hal ini disebabkan kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah (Firdausy, 2017:12). Hal tersebut membuat pemerintah daerah tidak berusaha untuk menggali potensi-potensi PADnya.

Selain itu, menurut Fatmawati & Pratiwi (2019:63) yang menyatakan bahwa meskipun dana transfer pemerintah pusat sangat penting bagi pengeluaran akan tetapi harus diimbangi dengan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak bersandar dan mengandalkan PAD untuk membiayai pengeluarannya sebagai upaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Apalagi tingkat PAD yang menjadi elemen kapasitas fiskal yang akan menentukan besaran dana transfer yang digelontorkan pemerintah pusat justru dijadikan ajang untuk mendapatkan dana transfer yang lebih banyak. Maka dari itu, kemandirian keuangan daerah sulit diwujudkan karena ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat serta tidak adanya usaha untuk peningkatan PAD.

Ketergantungan terhadap dana transfer tersebut disebabkan daerah menganggap bahwa rendahnya PAD sebagai akibat dari ruang gerak daerah yang terbatas karena diatur oleh UU untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerahnya (Firdausy, 2017:28). Padahal peningkatan PAD juga dapat terjadi dikarenakan faktor-faktor lain seperti PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto), inflasi, jumlah penduduk, jumlah wisatawan dan pengeluaran pemerintah (Prasetyo et al., 2022:38).

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan negara adalah dengan mengoptimalkan potensi sektor pariwisata. Pembangunan pariwisata sangatlah penting, karena pariwisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke

suatu daerah tujuan. Pengelolaan pariwisata harus dirancang, dibangun, dan dikelola secara profesional sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang (Ahmad, 2022:50). Apabila jumlah wisatawan terus meningkat maka akan menguntungkan bagi penerimaan pendapatan daerah yang semakin tinggi juga.

Pada akhirnya dengan meningkatkan PAD dengan melihat potensi daerah dan terus dikembangkan maka akan berdampak pada kemandirian keuangan daerah. Namun jika tidak meningkatkan PAD dan malah bergantung pada dana transfer pemerintah pusat maka tidak akan berdampak pada tercapainya kemandirian keuangan daerah.

Hasil penelitian ini didukung oleh Kusmila (2023:9232) yang menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Selain itu tidak adanya pengaruh mediasi dikarenakan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Fiscal Stress yang tidak berpengaruh signifikan. Hal ini merupakan dampak dari perilaku asimetris pemerintah daerah yang lebih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat dibandingkan PAD untuk membiayai pengeluaran daerah. Maka perilaku asimetris ini menunjukkan fiscal stress yang terjadi di pemerintah daerah bukan merupakan tekanan fiskal dalam upaya untuk mencapai kemandirian yang diwujudkan dengan meningkatkan penerimaan sendiri untuk membiayai berbagai pengeluaran yang jumlahnya semakin meningkat.

Hal tersebut juga disampaikan menurut Manafe et al., (2018:126) dikarenakan adanya assymetric behaviour pemerintah daerah ini justru akan meningkatkan ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat dan di sisi lain hal ini akan menurunkan kemandirian keuangan daerah, namun hal ini tidak semata-merta menyebabkan daerah mengalami fiscal stress. Seperti yang diungkapkan menurut Fatriani et al., (2023:473) kemandirian mungkin tidak secara langsung mempengaruhi fiscal stress, namun berinteraksi dengan faktor-faktor yang lainnya.

Pemerintah daerah juga merasa lebih mudah meningkatkan anggaran pengeluaran daripada meningkatkan PADnya. Seperti yang diungkapkan oleh Firdausy (2017:12) menyatakan bahwa sering kali pengeluaran biaya digunakan untuk menjalankan program dinaikkan (markup) sejak awal pada setiap anggarannya. Padahal jika sejak awal penganggaran biaya program diefektifkan sehemat mungkin, maka sisa yang ada dapat digunakan untuk menjalankan program lainnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, tingkat ketergantungan semakin tinggi sehingga upaya peningkatan kapasitas fiskal justru mengalami hambatan dikarenakan kebijakan pemberian transfer ini justru menimbulkan kemalasan fiskal. Hasil ini sejalan dengan Prasetyo & Rahayu (2019:880) dan Abduh (2018) yang menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah tidak dapat mempengaruhi *fiscal stress*.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian yang dilakukan, maka disimpulkan bahwa Tingkat Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Fiscal Stress. Namun, Kemandirian Keuangan Daerah tidak mampu memediasi Pengaruh Tingkat Pendapatan Asli Daerah terhadap Fiscal Stress pada provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2016-2022.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan referensi keilmuan dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya dalam pengkajian keuangan daerah mengenai Tingkat Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah dan *Fiscal Stress*.

Sebagai saran dan masukan pada penelitian berikutnya diharapkan dapat menambahkan tahun penelitian dengan menggunakan indikator lain untuk mengukur *fiscal stress*. Penelitian berikutnya juga diharapkan dapat menggunakan variabel mediasi lain dan meneliti faktor lainnya yang dapat mampu mempengaruhi *fiscal stress* dan kemandirian keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Hadar, Z. Z., Ichwan, M., & Yunus, S. (2020). *Determinants of Fiscal Stress in Central Sulawesi 2014-2018 Period*. <https://doi.org/10.47312/aepr.v5i02.490>

- Andriani, R. N. R., & Wahid, N. N. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006-2015). *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 30–39. <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak/article/view/708/458>
- Fatmawati, A. P. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Cimahi. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 62–69. https://www.academia.edu/85496031/Pengaruh_Pendapatan_Aslil_Daerah_Dan_Dana_Perimbangan_Terhadap_Kinerja_Kuangan_Pemerintah_Kota_Cimahi
- Fitryani, W., Roy, J., & Muliadi, M. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Belanja Modal terhadap Fiscal Stress di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman*, 4(3). <https://doi.org/10.29264/jiem.v4i3.5604>
- Gede, I. K., Hosea, E., Ratnaningsih, R., Hulu, D., Judijanto, L., Saktisyahputra, Rinaldi, M., Munizu, M., Kusumastuti, S. Y., Subiantoro, A., Hidayat, C., & Wahyuni, N. N. T. (2024). *Metodologi Penelitian Manajemen Bisnis*. CRMP. www.buku.sonpedia.com
- Ghozali, Z., Martini, R., Arifin, M. A., Masnoni, Sutandi, S., Rinaldi, M., Saktisyahputra, & Anggraini, H. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Akuntansi*. www.buku.sonpedia.com
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah* (4th ed.). Selemba Empat.
- Irwansyah, Rinaldi, M., Yusuf, A. M., Ramadhani, M. H. Z. K., Sudirman, S. R., & Yudaruddin, R. (2023). The Effect of COVID-19 on Consumer Goods Sector Performance: The Role of Firm Characteristics. *Journal of Risk and Financial Management*, 16(11), 483. <https://doi.org/10.3390/jrfm16110483>
- Kusmila, Z. (2023). Pengaruh Pad dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2020. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 9226–9234. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.7800>
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Manafe, M. W. N., Ena, Z., & Saul Adu, S. (2018). Fiscal Stress: Studi Kasus Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur. In *WAHANA* (Vol. 21, Issue 2). <http://jurnalwahana.aaykpn.ac.id/index.php/wahana/article/view/152>
- Putra, W., Syahbandi, J., & Mahdi, I. (2023). Pengaruh belanja modal dan pendapatan asli daerah terhadap fiscal stress melalui pertumbuhan ekonomi. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(2), 733. <https://doi.org/10.29210/020232750>
- Ramadhani, M. A., & Rinaldi, M. (2023a). Optimalkan Potensi Bisnis: Pendampingan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia di UMKM Kota Balikpapan. *Journal Of International Multidisciplinary Research*, 1(2), 908–913. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i2.228>
- Ramadhani, M. A., & Rinaldi, M. (2023b). Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen Organisasi, Sikap Kerja Serta Kinerja Karyawan Pada Hotel X Di Samarinda. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(4), 1206–1220. <https://doi.org/10.30651/jms.v8i4.21284>
- Rawung, W., Katiandagho, T. M., & Tarore, M. L. G. (2018). *Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Kontribusinya terhadap Belanja Daerah Kota Manado* (Vol. 14). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jisep/article/download/22275/21960>
- Rinaldi, M., & Ramadhani, M. A. (2023). The Effect Of Tax Accounting Choice, Size And Multinational Company On Tax Aggresiveness. *Journal of Accounting for Sustainable Society (JASS)*, 5(2), 08–15. <https://doi.org/10.35310/jass.v5i02.1168>
- Rinaldi, M., & Ramadhani, M. A. (2024a). Peningkatan Literasi Perpajakan dalam Kalangan UMKM: Langkah Menuju Kemandirian Finansial. *Eastasouth Journal of Effective Community Services*, 2(03), 158–169. <https://doi.org/10.58812/ejecs.v2i03>
- Rinaldi, M., & Ramadhani, M. A. (2024b). The Influence Of Managerial And Institutional Ownership On Corporate Social Responsibility Disclosure: Evidence From Indonesian Listed Companies (2020-2022). *International Conference of Multidisciplinary Cel: Proceeding*, 1(1), 125–133. <https://proceeding.ressi.id/index.php/IConMC>

- Rinaldi, M., Ramadhani, M. A., Sudirman, S. R., Ramadhani, M. H. Z. K., & Yusuf, A. M. (2023). Pendampingan Penyampaian SPT pada Toko Permata dan Kerajinan di Pasar Inpres Kebun Sayur Kota Balikpapan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 2(2), 146–151. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i2.228>
- Rinaldi, M., Sudirman, S. R., & Ramadhani, M. A. (2024). Kinerja Lingkungan, Dewan Komisaris Independen dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility: Tinjauan pada Konteks Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Dasar dan Kimia. *EKOMA: Jurnal Ekonomi*, 3(4), 755–763.
- Rivaldi, M., & Anggraini, Y. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(6), 6831.
- Rupilu, W., Hendrini, E. T. P., & Lakusa, M. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Belanja Modal terhadap Fiscal Stress. <https://doi.org/10.51135/PublicPolicy.v4.i1.p47-63>
- Santoso, A. (2020). Ipteks Perhitungan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang. *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*, 4(1), 1–7. <https://media.neliti.com/media/publications/294157-ipteks-perhitungan-potensi-pendapatan-as-f7f0dde8.pdf>
- Septira, F., Farida, I., & Prawira, A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fiscal Stress. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 57–64. <https://doi.org/10.17509/jpak.v%vi%i.15949>
- Sibuea, H. (2017). *Variabel-variabel yang mempengaruhi Fiscal Stress Pemerintah Kabupaten di Indonesia* [Skripsi FEB]. Universitas Lampung.
- Sulistyo, A. , T. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Indonesian Treasury Review*, 3(1), 43–59. <https://itrev.kemenkeu.go.id/index.php/ITRev/article/view/22/15>
- Susilawati, D., Kusumastuti Wardana, L., & Fajar Rahmawati, I. (2018). Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2). <https://doi.org/10.18196/jati.010210>
- Syifa, A., Suhendar, D., & Purnama, D. (2021). Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Fiscal Stress pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *JRKA*, 7(2), 76–86. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/jrka/article/view/4965/2771>
- Tolosang, K. D. (2018). PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KOTA TOMOHON. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(03). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/20689>
- Ulfa, M., Haryadi,), & Gowon, M. (2021). *The Effect of Regional Original Income, and General Allocation Funds on Fiscal Stress in Jambi Province*. 6(3), 189–198. <https://doi.org/10.22437/jaku.v6i3.12908>
- Winanto, A., Rahman, R. S., Rinaldi, M., Prawiranegara, G. P., Judijanto, L., Tampubolon, A. S., Muhtarudin, Bibiana, R. P., Yuliah, A., Suyati, S., Ginting, W., & Suhardi, D. (2024). *Perpajakan Teori Komprehensif*. www.bukusonpedia.com